

Defense Entrepreneurship a Solution to RI Limited Defense Budget

Ivan Yulivan^{1*}, Jonni Mahroza², Rianto³, Lukman Yudho Prakoso⁴, Muhammad Ikmal Setiadi⁵

^{1,2,4,5}Universitas Pertahanan RI

³Universitas Trisakti

Corresponding Author: Ivan Yulivan ivan36yulivan@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords : Budget, Defense, Entrepreneurship, Industry, Defense

Received : 01 December

Revised : 21 December

Accepted: 27 January

©2024 Yulivan, Mahroza, Rianto, Prakoso, Setiadi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The vision of a defense budget of 1.5% of gross domestic product (GDP) in 2025 is still difficult to realize. Until 2024, the proportion of Indonesia's defense budget will still be below 1 percent. In addition, the distribution of Indonesia's 2018-2025 defense spending is mostly used for personnel spending and operations and maintenance, followed by the procurement budget. Proficiency in defense entrepreneurship requires risk tolerance, innovation and efficient management; These are important factors for facing changes that will occur in the strategic environment. Using qualitative methodology, this research examines the phenomenon of state problems within the limited state budget for the development of its defense industry. Data was obtained through observation and review of previous research literature. State issues must be reformed in various ways so that various interests and responsibilities can be integrated in order to optimize the state's contribution to the growth of defense entrepreneurship in the defense industry.

Defense Entrepreneurship Sebuah Solusi Terbatasnya Anggaran Pertahanan RI

Ivan Yulivan^{1*}, Jonni Mahroza², Rianto³, Lukman Yudho Prakoso⁴, Muhammad Ikmal Setiadi⁵

^{1,2,4,5}Universitas Pertahanan RI

³Universitas Trisakti

Corresponding Author: Ivan Yulivan ivan36yulivan@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Anggaran, Defense, Entrepreneurship, Industri, Pertahanan,

Received : 01 Desember

Revised : 21 Desember

Accepted: 27 Januari

©2024 Yulivan, Mahroza, Rianto, Prakoso, Setiadi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Visi anggaran pertahanan 1,5% dari produk domestik bruto (PDB) tahun 2025 masih sulit terwujud. Hingga tahun 2024 ini, proporsi anggaran pertahanan Indonesia masih di bawah 1 persen. Selain itu, distribusi belanja pertahanan Indonesia 2018-2025 sebagian besar digunakan untuk belanja personel serta operasi dan pemeliharaan, diikuti anggaran pengadaan. Kemahiran dalam *defense entrepreneurship* memerlukan toleransi risiko, inovasi, dan manajemen yang efisien; inilah faktor-faktor penting untuk menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam lingkungan strategis. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini mengkaji fenomena permasalahan negara dalam keterbatasan anggaran negara untuk pengembangan industri pertahanannya. Perolehan data dilakukan melalui observasi dan tinjauan literatur penelitian sebelumnya. Permasalahan kenegaraan harus direformasi dengan berbagai cara agar beragam kepentingan dan tanggung jawab bisa diintegrasikan guna mengoptimalkan kontribusi negara terhadap pertumbuhan *defense entrepreneurship* di industri pertahanan.

PENDAHULUAN

Jika dikonversikan ke dalam mata uang, perkiraan nilai kekayaan Indonesia berupa sumber daya alam yang melimpah adalah Rp. 200 ribu triliun. Meskipun hal ini mampu mengubah Indonesia menjadi negara yang makmur dan maju, hal ini juga merupakan ancaman yang signifikan bagi negara. Dalam upaya mewujudkan pertahanan negara yang kokoh. Perkembangan industri pertahanan di Indonesia dinilai masih jalan di tempat. Selain riset yang belum optimal, proporsi anggaran yang terbatas dan sulit ditingkatkan serta tidak adanya program yang berkelanjutan ditengarai sebagai sebab. Dibutuhkan inovasi jangka menengah dan panjang untuk mengatasi persoalan ini. Rencana pembuatan senjata EMB-314 Super Tucano hilang begitu saja di tengah jalan. Demikian pula rencana pengembangan jet tempur Korea Fighter X (KFX) dan Indonesia Fighter X (IFX) dan pembuatan kapal selam yang tak ada kelanjutannya. Harapan untuk memajukan industri pertahanan masih berbenturan dengan minimnya anggaran. Anggaran penelitian dan pengembangan (litbang) masih sangat minim. Karena itu, akan sulit mengharapkan percepatan peningkatan kemandirian apabila hanya mengandalkan litbang dalam negeri.

Visi anggaran pertahanan 1,5% dari produk domestik bruto (PDB) tahun 2025 masih sulit terwujud. Hingga tahun 2024 ini, proporsi anggaran pertahanan Indonesia masih di bawah 1 persen. Selain itu, distribusi belanja pertahanan Indonesia 2018-2025 sebagian besar digunakan untuk belanja personel serta operasi dan pemeliharaan, diikuti anggaran pengadaan. Adapun anggaran untuk litbang belum menjadi prioritas. Meskipun proporsi anggaran masih minim, Indonesia merupakan salah satu negara dengan impor senjata tertinggi di dunia. Berdasarkan data Internasional Arms Transfer SIPRI, Indonesia menduduki peringkat keenam belas importir persenjataan terbesar secara global selama periode 2012-2016 dan 2017-2021. Pada tahun 2017 - 2021, posisi Indonesia akan berada di bawah Amerika Serikat, Inggris, dan Israel. Indonesia menduduki peringkat pertama di antara negara-negara Asia Tenggara dalam hal impor persenjataan, bahkan melampaui Vietnam dan Singapura (masing-masing peringkat ke-15 dan ke-20) (Nastitie, 2023).

Kemahiran dalam *defense entrepreneurship* memerlukan toleransi risiko, inovasi, dan manajemen yang efisien; inilah faktor-faktor penting untuk menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam lingkungan strategis. Dalam kerangka anggaran pertahanan yang terbatas, *defense Entrepreneurship* dianggap sebagai solusi yang bisa mengatasi hambatan terhadap pengembangan industri dalam negeri sekaligus menghasilkan prospek ekonomi yang mendukung sektor pertahanan nasional. Selain itu, anggaran sebesar itu bisa dialokasikan kembali dari program-program sosial untuk mendukung pengembangan kekuatan dan persenjataan tambahan melalui penciptaan ribuan lapangan kerja, sehingga memberikan pengaruh yang lebih besar kepada industri militer, mengingat perusahaan-perusahaan industri militer memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Ekonomi Pertahanan

Menurut Supandi (2018), studi ekonomi pertahanan mempunyai peran strategis, sebagai bidang studi ekonomi yang mengkaji tentang potensi dan pengelolaan sumberdaya nasional melalui teknologi sebagai sumberdaya pertahanan yang dikembangkan untuk kepentingan pertahanan nasional. Berbicara mengenai kebijakan keamanan nasional, strategi militer, operasional taktik sekalipun pasti akan dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Menurut (Halim, 2020) Ekonomi pertahanan, secara umum, adalah studi ilmiah mengenai keterkaitan antara belanja pertahanan dan faktor-faktor ekonomi terkait yang timbul dari belanja militer. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk kepentingan masyarakat dan menjamin keamanan nasional.

2. Teori Anggaran

Menurut Garrison (2012) dalam bukunya berjudul *managerial accounting 17th edition* anggaran adalah instrumen akuntansi yang bisa membantu eksekutif bisnis dalam perencanaan dan pengelolaan operasi. Anggaran menguraikan sumber daya yang diperkirakan akan diperoleh dan digunakan dalam jangka waktu tertentu. Anggaran memiliki tujuan ganda, yaitu memberikan panduan bagi kegiatan dan memfasilitasi perbandingan ketika mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga menjamin kendali atas proses pelaksanaan.

3. Teori Peran

Teori Peran dari Role Theory adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Organisasi sebagai sebuah institusi sosial telah membentuk perspektif terhadap peran yang diterima oleh seorang individu. Bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok

METODOLOGI

Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini mengkaji fenomena permasalahan negara dalam keterbatasan anggaran negara untuk pengembangan industri pertahanannya. Akumulasi data dilakukan melalui observasi dan tinjauan literatur yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya. Permasalahan kenegaraan harus direformasi dengan berbagai cara agar beragam kepentingan dan tanggung jawab bisa diintegrasikan guna mengoptimalkan upaya negara dalam menumbuhkan *defense entrepreneurship* di industri pertahanan. Dengan menyelidiki potensi sumber daya suatu negara dan mengekstraksi sumber data dari proses penelitian kepustakaan (buku, jurnal atau artikel, arsip, terbitan berkala, dan internet), teori-teori pendukung kemudian diterapkan pada data tersebut untuk menentukan strategi dan kebijakan mana yang akan diterapkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan belanja alutsista, sebagai bagian dari pembangunan postur militer yang ideal telah menjadi salah satu agenda penting di bidang pertahanan. Upaya tersebut diimplementasikan pemerintah melalui kebijakan *Minimum*

Essential Forces (MEF) yang mulai dilaksanakan sejak 2010 dan ditargetkan rampung pada 2024. Dukungan anggaran yang berkelanjutan menjadi faktor penting, mengingat pemenuhan alutsista TNI masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas dalam mewujudkan kekuatan pokok minimum komponen utama pertahanan negara. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya sektor pertahanan Indonesia, khususnya dalam hal persenjataan masih belum optimal. Ada kesenjangan antara kondisi alutsista yang dimiliki dengan kebutuhan yang ditargetkan dalam postur ideal. Anggaran belanja pertahanan negara tidak seluruhnya dialokasikan untuk modernisasi alutsista, tetapi juga untuk dukungan manajemen, kebijakan dan regulasi pertahanan, kesejahteraan prajurit, pelaksanaan tugas TNI, dan pembinaan sumber daya pertahanan (Ariani et al., 2023).

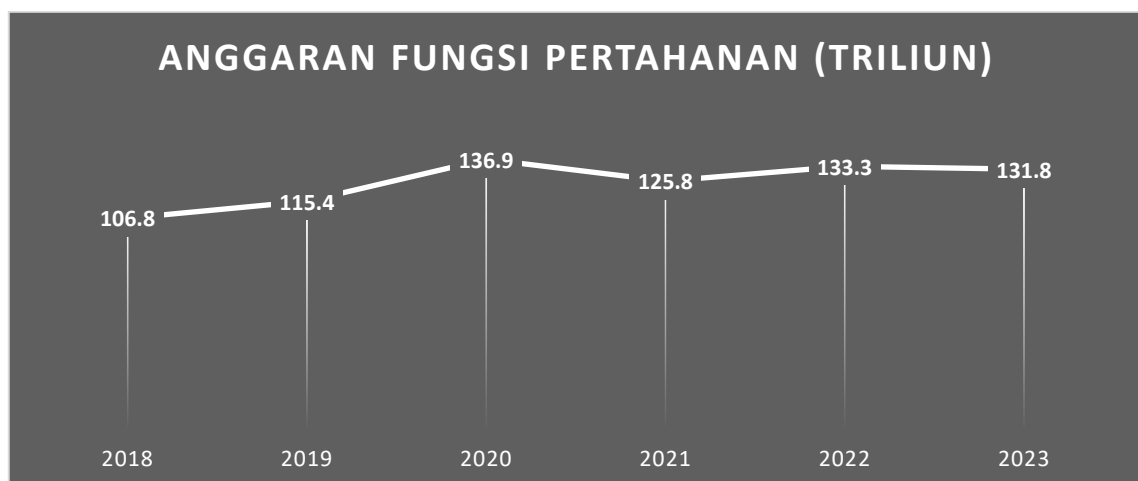
Banyak pihak menilai bahwasanya kebijakan anggaran pertahanan yang secara besar di alokasikan tidak memiliki dampak signifikan kepada publik. Setelah hampir delapan dekade merdeka, anggaran pertahanan Indonesia secara konsisten tetap berada di bawah 1% PDB, sebagaimana dibuktikan oleh data yang tersedia. Proporsi PDB Indonesia yang dialokasikan untuk anggaran pertahanan masih lebih rendah dibandingkan negara tetangga. Untuk kondisi tahun 2023, menurut Bank Dunia, Singapura 3,2% sebesar US\$12 miliar dari PDB, dan Australia 1,96% atau US\$ 30.7 miliar dari PDB. Perdebatan mengenai manfaat peningkatan anggaran pertahanan masih terus terjadi, sebagian karena sifat anggaran yang berpusat pada biaya dan anggapan bahwasanya anggaran tersebut kurang memberikan dampak nyata terhadap publik (yaitu *Wasteful*). Hal ini berbeda dengan anggaran yang dialokasikan untuk sektor-sektor seperti industri, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, yang hasil nyatanya bisa dilihat oleh masyarakat. Selain itu, terdapat banyak individu yang percaya bahwasanya upaya pertahanan nasional tidak hanya melibatkan penerapan kekuatan militer (*hard power*). Dukungan dari organisasi regional dan internasional, seperti PBB dan ASEAN, serta kemandirian pertahanan negara. diplomasi bisa terus membantu penegakan perdamaian di negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia (Santika, 2022).

Untuk mengatasi persoalan terbatasnya anggaran pertahanan ini, salah satu bentuk *defense entrepreneurship* yang bisa dilakukan adalah agar proporsi anggaran pertahanan Indonesia bisa ditingkatkan secara bertahap sampai dengan 2045 mendekati rata-rata global, yaitu 2 persen (Rusdiana et al., 2021). Dengan mendorong transformasi industri pertahanan, misalnya, dengan pemanfaatan kerja sama pemerintah dengan produsen senjata menuju rantai pasok senjata global. Setidaknya jika negara membeli alutsista dari luar negeri, sebagian besar komponennya di produksi oleh industri dalam negeri, sehingga ada *sharing* teknologi serta akan memudahkan dalam perawatannya. Langkah tambahan lainnya adalah dengan menarik investasi internasional untuk membangun fasilitas pemeliharaan dan perbaikan di Indonesia, dengan fokus khusus pada enam puluh persen peralatan pertahanan TNI yang beroperasi. Di level Asia Tenggara, Indonesia juga punya kemiripan alutsista dengan negara-negara di ASEAN. Kalau kita bisa membangun pusat pemeliharaan, itu bisa

menjadi salah satu potensi pendapatan dalam meningkatkan anggaran pertahanan negara yang terbatas (Prakoso, Prihantoro, et al., 2021).

Sebelum membangun industri yang cukup besar, penting untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi mendasar dengan bantuan kebijakan pemerintah yang sesuai. Militer sebagai *end user* harus mendukung pengembangan kompetensi fundamental industri pertahanan nasional dengan mengakui dan menerima kekurangan yang dimilikinya. Industri-industri nasional yang baru lahir mempunyai kecenderungan untuk memproduksi produk-produk dengan kualitas di bawah standar dengan biaya yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan industri-industri impor. Meskipun demikian, tanpa adanya dukungan dari pemerintah pusat dan militer, industri pertahanan nasional tidak akan mampu memproduksi barang-barang yang kompetitif, dan militer Indonesia akan bergantung pada alternatif impor (Dipua et al., 2021).

Produk-produk pertahanan yang tidak menjadi produk unggulan akan terpaksa diimpor dari industri luar negeri. Produk pertahanan yang diproduksi secara lokal bukan berarti produk dengan teknologi rendah dan tertinggal. Demikian pula, pengadaan produk pertahanan asing tidak selalu dianggap sebagai komponen berteknologi tinggi. Meskipun demikian, produk pertahanan yang diperoleh di dalam negeri harus terdiri dari komponen-komponen yang berasal dari kemampuan dasar sektor pertahanan dalam negeri. Misalnya saja pada produk kendaraan lapis baja. Kualitas kompetensi PT. Pindad melakukan fabrikasi struktur kendaraan darat dengan cara memotong, mengelas, dan membentuk pelat logam. PT. Pindad harus memasok semua kategori produk pertahanan yang mencakup pemotongan pelat logam, pengelasan, dan komponen pembentuk. Di antaranya pengadaan kendaraan taktis (Komodo), kendaraan tempur (Anoa dan Tarantula), serta kendaraan dinas kelas Avanza, Vios, Innova, Corolla, dan Camry (Montratama, 2018).



Gambar 1. Grafik Anggaran Fungsi Pertahanan dari Tahun 2018 Hingga 2023
Sumber: Nota Keuangan RAPBN, 2023

Berdasarkan Gambar 1, bisa dilihat bahwasanya anggaran pertahanan Indonesia mengalami kecenderungan peningkatan signifikan dari tahun 2018 ke

2020, walaupun sempat turun di tahun 2021 akibat *refocusing* anggaran pada masa pandemi Covid-19. Tahun 2022 hingga 2024, anggaran pertahanan yang bersumber dari APBN terus mengalami peningkatan. Tahun 2024, alokasi anggaran pertahanan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. RAPBN 2024 sebelumnya mengalokasikan anggaran Kementerian pertahanan sebesar Rp135,4 triliun. Dalam perkembangannya, pada akhir November 2023, pemerintah menyepakati penambahan Rp61,58 triliun atas anggaran pertahanan yang bersumber dari pinjaman luar negeri. Alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan yang cenderung meningkat menimbulkan kritik di tengah pemulihan kondisi perekonomian Indonesia. Kritik terhadap besaran anggaran pertahanan yang dialokasikan oleh pemerintah pada dasarnya merupakan hal yang wajar terutama dalam pemerintahan demokratis. Pertimbangan pembangunan persenjataan dan pembangunan kesejahteraan (*guns versus butter*), kembali pada prioritas pembangunan yang hendak dilakukan oleh suatu negara (Carter et al., 2021). Sederhananya, besarnya investasi keuangan pemerintah di sektor pertahanan pada hakikatnya terkait dengan pengakuan pemerintah terhadap pentingnya penguatan kemampuan dan kesiapan TNI dalam rangka menjaga keamanan negara, keutuhan wilayah, dan kedaulatan negara (Djarwono, 2017).

Pemerintah Indonesia harus secara efektif mengupayakan *defense entrepreneurship* dipadukan dengan kemandirian dalam pembangunan infrastruktur pertahanannya. Walaupun kemandirian secara penuh sulit untuk dicapai, Langkah untuk terus berupaya mandiri tidak boleh stagnan, meskipun terdapat tantangan berat untuk mencapainya. Pengembangan industri pertahanan harus mengutamakan komponen dan alutsista buatan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Memastikan pelaksanaan mandat undang-undang ini secara efektif dan penuh dedikasi sangatlah penting. Indonesia tidak hanya diberkahi dengan manfaat yang disebutkan di atas melalui kemampuannya memproduksi alutsista sendiri, namun juga memiliki reputasi yang diakui secara global (Prakoso, Salim, et al., 2021). Sektor swasta diyakini memiliki kemampuan unggul dalam bidang manajemen dan permodalan, IPTEK, serta teknologi. Konsisten dengan penguasaan IPTEK mutakhir, partisipasi sektor swasta dalam konsep *defense entrepreneurship* tidak hanya akan meningkatkan kemampuan produksi pertahanan, namun juga pembangunan infrastruktur, peluang kerja, dan pada akhirnya merangsang pertumbuhan ekonomi. Sebagai konsekuensi dari kebijakan ini, diharapkan sektor swasta kini mampu memproduksi berbagai macam alutsista, tidak hanya sebagai penyedia bahan baku, komponen, dan pembuat subsistem, namun juga sebagai mitra kolaboratif dalam prosesnya (Alfianzi, 2022).

Litbang Kementerian Pertahanan di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks karena terkait dengan penguasaan Iptek yang multidisiplin, terbatasnya penguasaan personel terhadap iptek, dan terbatasnya anggaran litbang; Oleh karena itu, program litbang Kementerian Pertahanan harus dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini mengatur bahwasanya program litbang harus dilaksanakan dengan pemikiran dan metodologi yang matang untuk

menjamin hasil optimal yang bersifat *user-beneficial* dan *user-required*, tidak ada tumpang tindih litbang antara TNI dan Kementerian Pertahanan, serta tidak ada kegagalan. Kesulitan yang ada saat ini semakin diperumit dengan sektor pertahanan dalam negeri yang saat ini tidak kompetitif karena kurangnya SDM; Kurangnya investasi pada inisiatif penelitian dan pengembangan di sektor pertahanan terus menghambat kemajuan bangsa Indonesia dalam hal kemampuan dan kemahiran penelitian; pengembangan kemampuan ke arah proses penciptaan berbasis IPTEK; Jaringan penelitian dan kelembagaan dalam skala regional, nasional, dan internasional; Produktivitas dan penerapan litbang nasional untuk memenuhi kebutuhan teknologi masyarakat; dan dengan konsep *defense Entrepreneurship*, pemanfaatan penelitian dan pengembangan nasional untuk menghasilkan nilai tambah dalam pengelolaan sumber daya nasional dan produk inovasi nasional dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi pertahanan nasional.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Defense Entrepreneurship bisa menjadi jawaban dibalik terbatasnya anggarannya pertahanan guna mewujudkan industri pertahanan nasional yang bisa berperan sebagai pilar serta penggerak perekonomian nasional.

Saran yang perlu ditindaklanjuti kedepannya adalah untuk menetapkan Strategi Dan Implementasi Dalam Menghadapi Dampak Perang Israel dan Hamas Dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi:

1. Membangun kepastian usaha dan persaingan yang sehat; mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh suatu kelompok atau individu yang bisa merugikan masyarakat;
2. Sesuai skema pembagian peran, Kementerian Pertahanan menetapkan *Military Industrial Complex* (MIC) sebagai kumpulan kemitraan strategis yang mencakup sektor perbankan, industri pertahanan, pensiunan militer, dan analisis kajian strategis.
3. Di sektor yang sangat padat teknologi, persyaratan penting untuk memastikan keunggulan teknologi pertahanan adalah optimalisasi upaya penelitian dan pengembangan yang intensif.

PENELITIAN LANJUTAN

Bagi penelitian selanjutnya, Penelitian selanjutnya bisa difasilitasi dengan temuan penelitian ini, khususnya dalam bidang kajian diplomasi pertahanan. Untuk menghasilkan penelitian yang lebih tepat, sebaiknya memperluas literatur yang digunakan. Penelitian ini mempunyai ruang lingkup yang terbatas karena dilakukan hanya melalui teknik tinjauan literatur dan studi literatur. Untuk penelitian selanjutnya, pustaka yang digunakan bisa lebih luas dan ditambahkan metode wawancara untuk memperkuat argumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianzi, D. (2022). Pengaruh Pembangunan Industri Pertahanan Terhadap Pertahanan Negara. *Jurnal Teknik Industri, Sistem Informasi ...*, 6(3), 6209–6216. http://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal_tinsika/article/view/91%0Ahttp://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal_tinsika/article/download/91/67
- Ariani, R. A., Saputro, G. E., & Prakoso, L. Y. (2023). Peran Ekonomi Dalam Meningkatkan Kemandirian Pertahanan Negara Melalui Konsep Sishankamrata. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1).
- Carter, J., Ondercin, H. L., & Palmer, G. (2021). Guns, Butter, and Growth: The Consequences of Military Spending Reconsidered. *Political Research Quarterly*, 74(1), 148–165. <https://doi.org/10.1177/1065912919890417>
- Dipua, A., Prakoso, L. Y., & Nurdiansyah, D. R. (2021). Analysis of Defense Strategy Policies in Dealing With the Potential Negative Impacts of the South China Sea Conflict. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 7(1), 89. <https://doi.org/10.33172/jp.v7i1.860>
- Djarwono, L. F. (2017). Pembangunan Industri Pertahanan Indonesia: Menuju Pemenuhan Target Mef Atau Sekedar Menuju Arm Candy? *Defendonesia*, 2(2), 25–34. <https://doi.org/10.54755/defendonesia.v2i2.61>
- Garrison, N. and B. (2012). Managerial Accounting. In *Encyclopedia of Business in Today's World*. <https://doi.org/10.4135/9781412964289.n608>
- Montratama, I. (2018). Strategi Optimalisasi Pengadaan Sarana Pertahanan Bagi Industri Pertahanan Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 4(3), 79. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v4i3.342>
- NASTITIE, D. P. (2023). *Pengembangan Industri Pertahanan Masih Terkendala Anggaran*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/09/11/pengembangan-industri-pertahanan-masih-terkendala-anggaran>
- Prakoso, L. Y., Prihantoro, K., & Suhirwan, S. (2021). Urgensi Tranformasi Networking dan Driver Force Kebijakan Pertahanan. In M. I. Setiadi (Ed.), *CV. Aksara Global Akademia*.
- Prakoso, L. Y., Salim, G., Ransangan, J., Subhilhar, Indarjo, A., & Yusriadi, Y. (2021). Implementation of the Défense Public Policy Defend the State in Indonesian Universities. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(Special Issue 2), 1–8. <https://www.abacademies.org/articles/implementation-of-the-dfense->

public-policy-defend-the-state-in-indonesian-universities.pdf

Rusdiana, D., Ali, Y., Thamrin, S., & Widodo, R. (2021). Strategi Pembangunan Industri Pertahanan Pada Negara Kepulauan Guna Mendukung Pertahanan Negara. *Jurnal Academia Praja*, 4(2), 427–440. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i2.629>

Santika, E. F. (2022). *Ini Pengeluaran Negara ASEAN untuk Pertahanan Militer pada 2022, Indonesia Dua Terbesar!* Katadata.co.id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/21/ini-pengeluaran-negara-asean-untuk-pertahanan-militer-pada-2022-indonesia-dua-terbesar>